

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Partisipasi Petani Dalam Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Desa

Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation", yang berarti "partisipasi" dengan orang lain. Sebagai seorang pemimpin, pelaksanaan tugas apapun akan lebih berhasil jika pemimpin dapat membantu bawahannya menjadi lebih terlibat. Partisipasi juga dapat didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam proses kegiatan sehingga program dapat berjalan sesuai harapan, baik karena alasan internal maupun eksternal.

Keith Davis dan Newstorm (1990) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan seseorang dalam situasi kelompok secara mental, pemikiran, dan moral, yang mendorongnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan dan mengambil tanggung jawab atas upaya dan tujuan tertentu. Partisipasi adalah ketika orang berpartisipasi dalam proses mengidentifikasi masalah dan cara menghadapinya, membuat keputusan atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut.

Menurut Keith Davis (1990), ada tiga ide penting tentang partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi merupakan keterlibatan/peran serta,
2. Partisipasi kontribusi adalah ketika seseorang memiliki kesempatan untuk menyalurkan kreativitasnya dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya untuk mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa seseorang merasa senang dan sukarela membantu kelompok,
3. Partisipasi adalah konsep tanggung jawab yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas kelompok..

Secara internasional, partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan; ini juga berarti adanya kegiatan aktif (Mardikanto, 1988 *dalam* Dzoelkarman, 2019). Masyarakat adalah salah satu komponen terpenting yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan tercapainya tujuan negara. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih menyadari keberadaannya agar mereka mau ikut serta dengan pemerintah dalam proses pembangunan negara. Karena partisipasi merupakan

perwujudan peran serta, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam segala bentuk pembangunan di wilayahnya untuk mencapai tujuan pembangunan.(Adenansi dkk., 2015).

Suparman (1980) *dalam* Saroy, T Goni, SYVI Zakarias, J D (2021), menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keinginan, kemauan, serta keikutsertaan yang mendasari keterlibatan aktif, kesanggupan, dan kesadaran dari setiap warga masyarakat untuk melaksanakan dan melanjutkan usaha-usaha pembangunan demi tercapainya tujuan pembangunan. Sifat pelaksanaan partisipasi dapat dibagi dua yaitu, *top down* dan *bottom up*, pada implementasinya secara operasional menekankan pada sifat khusus partisipasi yaitu gagasan inisiatif dimana pihak gagasan itu datang dari atas atau secara *top down*, dan dari pihak lain adalah bersal dari bawah atau dikenal dengan istilah *bottom up*. Partisipasi *top-down* merupakan partisipasi yang pada pelaksanaannya bersifat paksaan sedangkan partisipasi yang *bottom-up* pada pelaksanaannya bersifat sukarela (Cohen dan Uphoff 1977 *dalam* Saroy dkk, 2021). Hasil akhir dari partisipasi adalah sistem administrasi berjalan dengan baik dan kebijakan tidak dibuat tanpa persetujuan rakyat, sedangkan arah utama yang harus dikembangkan adalah proses pemberdayaan (Juliantara 2002 *dalam* Saroy, dkk 2021).

Untuk meningkatkan partisipasi, sasaran atau masyarakat dapat dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap proses—dari pengambilan keputusan perencanaan hingga penjelasan maksud dan tujuan, meminta saran dan tanggapan, meminta informasi, dan meningkatkan pendelegasian (Keno dkk, 2015). Partisipasi dalam proses pembangunan didefinisikan sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam proses tersebut, baik melalui pernyataan atau sumbangan, pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau bahan, dan keinginan untuk menggunakan dan menikmati hasil dari kegiatan pembangunan. (Sumaryadi, 2010 *dalam* Keno dkk, 2015).

Hamijoyo (2007) dan Sulistyorini dkk. (2015) membedakan partisipasi menjadi dua jenis: partisipasi pikiran, yang mencakup kontribusi pikiran, pendapat, dan ide serta masukan untuk membantu program berjalan lancar dan pengembangan kegiatan yang diikuti. Kedua, partisipasi tenaga, yang berarti

bahwa orang berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan usahanya untuk membantu program berhasil. Berpartisipasi dalam keterampilan mendorong anggota masyarakat yang membutuhkan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Partisipasi dalam bentuk barang berarti partisipasi dalam bentuk barang, yaitu partisipasi yang diberikan dalam bentuk barang atau harta, seperti alat kerja untuk memenuhi kebutuhan program. Terakhir, keikutsertaan dalam bentuk uang atau sumbangan finansial membantu perusahaan menjalankan operasinya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan jenis partisipasinya, partisipasi dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah partisipasi dalam bentuk nyata, seperti partisipasi dalam tenaga kerja, uang, keterampilan, dan barang. Jenis partisipasi yang tidak berwujud, seperti partisipasi dalam berpikir, adalah salah satu contohnya (Padjadjaran dkk, 2021).

Menurut Noviyanti dkk. (2019), partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam penyampaian pendapat atau saran, barang, keterampilan, atau jasa. Noviyanti dkk. membagi partisipasi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Partisipasi pikiran, yaitu partisipasi dalam menyumbangkan ide, gagasan, saran, kritik, dan pengalaman untuk keberlangsungan kegiatan.
2. Partisipasi tenaga, yang berarti berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan dan memperbaiki diri sendiri dan membantu orang lain. Ini juga disebut partisipasi spontan atas dasar sukarela.
3. Partisipasi harta benda—partisipasi dengan memberikan materi, seperti uang, barang, dan fasilitas, untuk kepentingan bersama.
4. Partisipasi keterampilan—partisipasi dengan keterampilan yang diberikan untuk pengembangan program.
5. Partisipasi sosial—partisipasi dalam kegiatan sosial.

Menurut Notoatmodjo (2010) dalam Noviyanti dkk. (2019), ukuran partisipasi terdiri dari hal-hal berikut: a) Kehadiran dan keaktifan individu dalam pertemuan tertentu, b) Memberikan sumbangan dan bantuan keuangan, c) Keanggotaan kepanitiaan, dan d) Status kepemimpinan.

Partisipasi petani sangat erat kaitannya dengan kekuasaan dan hak-hak petani, terutama pada tahap identifikasi masalah dalam pengambilan keputusan, pencarian solusi masalah, hingga pelaksanaan kegiatan. Tiga alasan utama mengapa partisipasi petani sangat penting. Pertama, partisipasi memungkinkan petani untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap petani, yang tanpanya program dan proyek pembangunan tidak akan berhasil. Kedua, ketika petani terlibat dalam proses persiapan dan perencanaan, mereka menjadi lebih percaya pada proyek atau program pengembangan karena mereka merasa memilikinya. Ketiga, dianggap bahwa petani memiliki hak demokrasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri (Keno dkk, 2015).

Partisipasi petani adalah keterlibatan dan keterlibatan petani, baik individu maupun kelompok, yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab di bidang pertanian. Petani harus dilibatkan sebagai subjek penyuluhan pertanian karena merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan program penyuluhan pertanian. Mengajukan pertanyaan PPL pada pertemuan penyuluhan, menghadiri pertemuan, dan cara lain dapat menunjukkan partisipasi (Moniaga, 2015).

Petani sangat diharapkan keterlibatan dan keikutsertaan dalam pembangunan mengingat petani merupakan sekelompok orang yang saling membutuhkan dan saling berinteraksi secara berkelanjutan dalam relasi sosial yang terorganisasi, dan petani merupakan objek sekaligus sebagai subjek pembangunan pertanian. Petani diharapkan mendukung dan mendorong agar terlaksananya sebuah program (Irwan dkk, 2021).

Menurut Davis (2005) dalam Mandaru dkk. (2021), partisipasi pikiran (partisipasi psikologis), partisipasi tenaga (partisipasi fisik), partisipasi waktu, dan partisipasi materi adalah beberapa bentuk partisipasi dalam kelompok tani yang dapat diukur melalui skoring atau penilaian.

1. Partisipasi Pikiran

Partisipasi petani berlangsung dalam bentuk pemikiran yang lebih terkonsentrasi pada tahapan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Partisipasi pemikiran meningkat selama tahap perencanaan. Selama tahap perencanaan, banyak hal yang perlu direncanakan dan dipikirkan secara menyeluruh. Petani biasanya berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan apakah program sudah

siap atau belum untuk dilaksanakan, dengan datang ke pertemuan, rapat, atau pertemuan (Padjadjaran dkk, 2021).

Bili dkk, (2018) menyebutkan bahwa partisipasi petani dalam bentuk pikiran yaitu ikut terlibat dalam memberikan saran dalam penyusunan program penyuluhan pertanian, terutama tentang masalah yang dihadapi, keinginan dan kebutuhannya dalam pengelolaan usahatannya. Keikutsertaan petani dalam penyusunan program penyuluhan pertanian menimbulkan rasa kepemilikan terhadap program pada diri petani sehingga program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Partisipasi Tenaga

Keterlibatan petani dalam penyusunan program penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai partisipasi dalam bentuk tenaga, di mana petani memberikan tenaga yang dapat diwujudkan dengan ikut membantu berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian (Padjadjaran dkk, 2021). bentuk partisipasi tenaga termasuk datang ke pertemuan kelompok dan aktif berpartisipasi dalam menyampaikan usulan selama rapat penyusunan program penyuluhan pertanian. Memberikan saran berarti memberikan kontribusi yang lebih besar untuk membangun program pertanian.

Program penyuluhan pertanian yang bekerja sama dengan petani memberikan gambaran luas tentang partisipasi masyarakat dan petani. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan petani dan masyarakat dalam tindakan dan aksi, atau sebagai rangkaian pemberdayaan keterlibatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan selama seluruh kegiatan pembuatan program. Kesuksesan seorang penyuluh pertanian dalam kelompok tani sangat bergantung pada keterlibatan petani dalam kegiatan penyuluhan, sehingga penyuluh tidak hanya melakukan sesuatu untuk petani, tetapi juga melakukan sesuatu bersama petani; petani menyumbangkan tenaganya dalam merencanakan dan menyusun program rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk kemajuan usahatani mereka (Bili dkk, 2018).

3. Partisipasi waktu

Partisipasi langsung adalah partisipasi yang ditunjukkan dengan ketersediaan dan partisipasi dalam program untuk mencapai tujuan pembangunan.

Jika tidak ada waktu, masyarakat tidak akan dapat berpartisipasi (Syamsi, 2014). Dengan berpartisipasi, petani merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, karena mereka melakukannya secara sukarela, menumbuhkan rasa bertanggung jawab (Isbandi, 2007).

4. Partisipasi Materi

Partisipasi dalam bentuk materi lebih kepada partisipasi dalam memberikan bantuan berupa uang yang dimanfaatkan untuk memperlancar berbagai usaha-usaha petani agar mencapai kebutuhannya (Padjadjaran dkk, 2021). Untuk memperlancar usaha-usaha dalam pertanian maka dibutuhkan bantuan dalam bentuk materi (Isbandi, 2007).

Baik petani maupun masyarakat dapat memberikan partisipasi mereka dalam program pembangunan dalam dua jenis. Yang pertama terdiri dari partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata, seperti uang, harta benda, dan tenaga, dan yang kedua terdiri dari partisipasi yang tidak nyata, seperti pikiran, pengambilan keputusan, dan partisipasi perwakilan (Isbandi, 2007).

2.1.2 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Desa

Menurut Daryana et al. (2019), program penyuluhan pertanian adalah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan arahan dan pedoman untuk mengontrol pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan penyuluhan. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa program penyuluhan pertanian dapat terdiri dari program desa, kelurahan, unit kerja lapangan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional.

Secara khusus, program penyuluhan pertanian pemerintah menjalankan program penyuluhan pertanian nasional, kabupaten, dan kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan secara sistematis dengan mempertimbangkan keinginan pelaku utama dan kelompok kepentingan lainnya. Program penyuluhan pertanian untuk desa, desa, dan kecamatan dapat berupa rencana tertulis yang dimaksudkan untuk memimpin dan mengarahkan secara sistematis pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Ini mencakup aspek kelembagaan, personel, pelaksanaan, dan sarana dan prasarana pembiayaan.

Sebuah program penyuluhan pertanian harus mengikuti beberapa prinsip, di antaranya:

1. Partisipatif, berarti bahwa kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan melalui keterlibatan aktif pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh pertanian dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
2. Bermanfaat, berarti bahwa program penyuluhan pertanian yang terstruktur dapat membantu memperbaiki perilaku pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan usaha.
3. Terpadu, yang berarti bahwa program penyuluhan pertanian disusun secara terpadu dan terintegrasi dengan mempertimbangkan program strategis pembangunan pertanian nasional dan daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.
4. Sinergi, yang berarti bahwa program penyuluhan pertanian yang disusun memiliki hubungan yang selaras dan saling memperkuat di setiap tingkat administrasi pemerintah.
5. Transparan, yang berarti bahwa selama proses penyusunan program penyuluhan pertanian di setiap tingkat administrasi pemerintah.
6. Demokratis berarti bahwa proses pembuatan program penyuluhan pertanian terintegrasi dan mempertimbangkan setiap program pemerintah daerah dengan program yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan pelaku usaha utama. Bertanggung gugat, artinya proses evaluasi program penyuluhan pertanian membandingkan rencana dengan pelaksanaan program penyuluhan pertanian sebelumnya untuk mengetahui pencapaian, rasionalitas, ketepatan waktu dan permasalahan yang dihadapi.
7. Perumusan tujuan dengan mempertimbangkan standar yang khas, dapat diukur, dapat dilakukan, sesuai dengan kemampuan, dan dibatasi oleh waktu dikenal sebagai SMART.

8. Pada bagian perumusan tujuan penyusunan program penyuluhan pertanian, elemen khalayak sasaran, perubahan perilaku yang diinginkan, kondisi yang akan dicapai, dan tingkat kondisi yang akan dicapai dianggap sebagai bagian dari konsep Audience, Behaviour, Condition, and Degree (ABCD).

Penyusunan programa penyuluhan pertanian pada penyelenggaraannya memperhatikan beberapa unsur. Unsur adalah substansi programa penyuluhan pertanian yang terdiri atas:

1. Keadaan

Keadaan terdiri dari data dan informasi faktual tentang potensi, produktivitas, dan produksi komoditas pertanian strategis dan komoditas unggulan lainnya, serta perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha pertanian serta lingkungan usaha tani. Untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan nyata dari pelaku utama dan pelaku usaha dalam kegiatan usaha yang dikenal sebagai Identifikasi Potensi Wilayah (IPW), data yang diperoleh melalui pengolahan dan analisis melalui metode PRA, teknik identifikasi faktor penentu (impact point), atau metode lainnya digunakan untuk menentukan elemen keadaan di kelurahan atau desa.

2. Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan pada perubahan keadaan yang diinginkan dan dicapai setiap tahun terkait dengan perilaku dan kecerobohan pedagang dan pelaku utama dalam kegiatan pertanian, sistem penyuluhan, dan upaya untuk menciptakan lingkungan pertanian yang mendukung tercapainya sasaran Program Komoditas Pokok Strategis Nasional dan sasaran komoditas unggulan regional lainnya. Pada tingkat kelurahan/desa, tujuan ditetapkan dengan merumuskan perubahan keadaan yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu tingkat penerapan inovasi teknologi modern yang disarankan dengan basis kelompok tani dan gabungan kelompok tani, Peran dan fungsi kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, P3A, UPJA, dan Koperasi pertanian) adalah untuk meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani, termasuk menambah jumlah petani yang bergabung dalam kelompok dan melakukan upaya untuk mempermudah atau menciptakan lingkungan usaha tani

yang kondusif, seperti ketersediaan pasar desa, kios saprodi, lembaga keuangan mikro desa, Koperasi pertanian.

3. Permasalahan

Merumuskan dan mengidentifikasi berbagai sumber dan faktor penyebab yang menyebabkan perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan yang ingin dicapai merupakan bagian dari penetapan masalah. Pada tingkat kelurahan atau desa, penetapan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang menyebabkan pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya secara optimal. Faktor-faktor ini termasuk faktor perilaku dan faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan komoditas. Faktor perilaku terdiri dari tingkat adopsi teknologi inovasi baru oleh pelaku utama dan pelaku usaha, sedangkan faktor non-perilaku terdiri dari ketersediaan atau kondisi sarana dan prasarana pendukung bisnis mereka, seperti benih dan pupuk, pengairan yang mendukung, dan modal usaha yang cukup.

4. Rencana Kegiatan

Matriks rencana kegiatan penyuluhan berisi rencana untuk mengubah perilaku pelaku utama dan pelaku usaha, serta matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan yang terdiri dari sarana dan prasarana. Matriks kegiatan merinci kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, serta siapa yang akan melakukan, kapan, di mana, bagaimana, dan biaya yang diperlukan. Mengingat bahwa program penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten, perumusan cara mencapai tujuan digunakan untuk menentukan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Matriks rencana kegiatan penyuluhan dan kemudahan pelayanan dan pengaturan hanya dibuat di tingkat kecamatan dan desa.

Bentuk keterlibatan petani dalam penyusunan program penyuluhan pertanian desa dapat berupa keikutsertaan dalam :

1. Identifikasi Potensi Wilayah

Identifikasi wilayah diperlukan dalam kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian untuk menyusun program yang tepat sasaran dan efektif. Untuk mendukung pengembangan potensi wilayah maka langkah yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan. Teknik yang dapat

dilakukan dalam kegiatan penggalian data dan informasi potensi wilayah dapat dilakukan dengan pendekatan secara partisipatif, dengan teknik PRA. Teknik PRA mampu memperoleh gambaran tentang masalah yang dihadapi secara umum yang kemudian dilakukan tahap analisis masalah dan menganalisis data secara obyektif sehingga dapat ditentukan kegiatan dan program apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Sutisna, 2019). Identifikasi wilayah dilakukan dan disusun untuk menjadi acuan bagi penyuluh untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kepada kelompok tani, kelompok usaha, gabungan kelompok tani dan kelompok lainnya guna menentukan media, metode dan materi apa yang akan digunakan untuk persiapan dan sebagai basis dalam pembuatan rencana program penyuluh pertanian yang akan dilaksanakan (Sutisna, 2019). Pentingnya peran penyuluhan menjadikan kegiatan penyuluhan memerlukan pengumpulan data awal sebelum melakukan penyuluhan pertanian. Pendekatan secara partisipatif dapat digunakan untuk proses penggalan informasi dan data potensi wilayah melalui data primer dan data sekunder yang akurat. Pengembangan terhadap potensi wilayah memiliki urgensi yang sangat penting sehingga perlu untuk dilakukan. Dokumen perencanaan pembangunan wilayah dan potret ekonomi suatu wilayah diperlukan untuk menentukan dan melakukan pengembangan potensi wilayah yang dimiliki (Maulina, 2021).

Metode pendekatan secara partisipatif atau *participatory rural appraisal* (PRA) dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang dihadapi. PRA bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar pemangku kepentingan untuk memungkinkan pekerja pembangunan, pejabat pemerintah dan masyarakat lokal bekerja sama untuk merencanakan program yang tepat (Suryono dkk, 2022). Tahap PRA memanfaatkan pola komunikasi dua arah yang berupa komunikasi mengenai kebutuhan dan harapan petani. dialog dua arah ditunjukkan dengan harapan adanya umpan balik dari setiap partisipasn baik secara verbal maupun non verbal (Mughtar dkk, 2014). Hal ini ditunjukkan untuk mewujudkan dan membangun keterlibatan petani melalui penyaluran kepentingan petani dalam penyusunan program penyuluhan pertanian (Suryono dkk, 2022). Dengan adanya metode pendekatan PRA maka diharapkan masyarakat dapat

ikutserta dalam proses pengembangan dan pembangunan sebuah program (Susanto dkk, 2022).

Manfaat utama penerapan pendekatan PRA adalah untuk memberikan dorongan dan dukungan efektif dalam setiap proses tahapan penyuluhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks undang-undang desa maka PRA dapat memberikan pemahaman kepada para aparatur pemerintahan desa dalam melakukan proses identifikasi potensi dan permasalahan di desanya (Suryono dkk, 2022).

2. Rembugtani

Kegiatan rembug tani pada pelaksanaannya erat kaitannya dengan kenyamanan beaspirasi dengan menampung keperluan dalam mengupayakan peneyelenggaraan penyuluhan pertanian yang lebih majunsehingga mencapai kehidupan yang lebih sejahtera (Nurlela, 2018). Rembugtani merupakan sebuah usaha yang diupayakan dalam pemberdayaan masyarakat tani yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengiventarisasi berbagai permasalahan dan kekhawatiran yang dihadapi oleh anggota kelompok tani yang dilakukan secara berkesinmabungan dan terjadwal oleh kelompok tani dan gabungan kelompok tani dengan difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang ditugaskan diwilayah kerjanya. Pelaku utama dan pelaku usaha yang telah tergabung dalam poktan maupun gapoktan diharuskan memiliki kemampuan untuk mengaspirasikan usulan dan gagasalan dalam suatu forum atau musyawarah sehingga terciptanya komunikasi antara anggota kelompok tani, sesama kontaktani dengan lembaga lainnya, ini merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan sukses atau tidaknya suatu kegiatan penyuluhan pertanian sesuai program yang telah disusun (Yunita et al., 2018).

3. Musrenbangtan Desa

Musyawarah perencanaan pembangunan pertanian (Musrenbangtan) suatu musyawarah yang dilaksanakan di tingkat kecamatan untuk menghimpun usulan kegiatan dari tiap-tiap kecamatan sebagai upaya perencanaan yang bersifat *bottom up*. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan (Murenbang), dilaksanakan dalam bentuk musyawarah yang membahas dan meyepakati langkah penanganan program utama yang tercantum didalam usulan rencana kegiatan pembangunan

desa maupun pertanian (Singkoh, 2021). Musrenbang memiliki nilai yang dianggap sangat baik dan secara representative mampu mengakomodir kepentingan petani dalam merencanakan pembangunan karena bersifat aspiratif dan dialogis. Musrenbang juga dikenal dengan istilah pendekatan secara *bottom-up*, yang diharapkan mampu mencerminkan proses perencanaan secara partisipatif, yang melibatkan seluruh pihak yang berwajib terhadap pembangunan untuk memperoleh aspirasi demi menciptakan rasa tanggung jawab dan saling memiliki terhadap program (Singkoh, 2021).

Koiruddin (2005:151-152) menyebutkan beberapa hal yang wajib diketahui sebelum memulai perencanaan pembangunan, yakni: Permasalahan yang dihadapi sangat terkait dengan faktor ketersediaan sumber daya yang ada, Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai oleh pelaksanaan, Kebijakan dan cara mencapai tujuan maupun sasaran berdasarkan alternatif yang dipandang sangat baik, Penjabaraan dalam program-program atau kegiatan yang kongkrit, Jangka waktu pencapaian.

Menurut Cohen dan Uphoff *dalam* Azhar dkk., (2015) dukungan dan keterlibatan masyarakat akan menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang diputuskan. Oleh sebab itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan pembangunan karena musrenbang mampu memberikan gambaran bagaimana forum tersebut melibatkan masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan program pemerintah ataupun dalam proses kebijakan penganggaran.

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani dalam Penyusunan Program Desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam penyusunan program desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

1. Karakteristik individu petani

Karakteristik individu petani mempengaruhi partisipasi petani dalam pembuatan program penyuluhan pertanian; karakteristik ini adalah sifat yang berasal dan melekat pada seseorang dan merupakan pembawaan individu yang dapat menggambarkan identitas mereka. Karakteristik adalah aspek unik

petani.(Fangohoi dkk, 2022). Karakteristik individu petani terdiri atas, umur, pendidikan, pendapatan. Petani yang berpendidikan rendah akan sulit dalam memberikan informasi mengenai keadaan yang mereka alami dalam usahataniya sehingga tingkat partisipasinya rendah dalam penyusunan program penyuluhan pertanian (Bili dkk, 2018). Tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi petani dalam penyusunan program, pendidikan formal akan mempengaruhi tingkat pengetahuan petani, tingkat melek huruf, akses informasi, serta tingkat adaptasi teknologi yang akan berdampak pada partisipasinya (Hapsari dkk, 2019). Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Ardiana dan Augusta (2019), tingkat pendidikan seseorang akan sangat penting dan menentukan partisipasinya, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi partisipasinya. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diberikan kepada petani di luar pendidikan formal, seperti pelatihan dan penyuluhan (Isnayanti dkk, 2019).

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan dan kemampuan khusus seseorang atau sekelompok orang. Pelatihan umumnya memengaruhi efek kognitif dan non-kognitif seseorang (Sugiantara & Utama, 2019). Partisipasi petani dalam program penyuluhan dipengaruhi oleh usia mereka; umur adalah salah satu faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan masyarakat; orang-orang dari kelompok usia menengah ke atas cenderung lebih terlibat dalam kegiatan tersebut dibandingkan dengan orang-orang dari kelompok usia lain (Ardiana dan Augusta, 2019).

2. Kosmopolitan petani

Kosmopolitan petani mempengaruhi partisipasi petani dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Menurut Jalieli dan Sadono (2015), tingkat kosmopolitan petani yang tinggi akan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Hal ini juga berlaku pada partisipasi penyusunan program desa, apabila tingkat kosmopolitan tinggi maka tingkat partisipasi petani tinggi. Pengaruh kosmopolitanisme terhadap tingkat partisipasi petani menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kosmopolitan seseorang maka semakin tinggi pula partisipasi programnya (Syifa dkk, 2020).

Tingkat kosmopolitan merupakan tingkat hubungan atau tingkat interaksi seseorang dari dunia luar diluar sistem sosialnya untuk menambah pengalaman. Tingkat kosmopolitan diartikan sebagai kemampuan manusia untuk memahami informasi dan subjek informasi dalam hal melihat, mendengar dan membaca, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekstrateritorial untuk mendapatkan pengalaman, mengubah pola sikap dan memecahkan masalah. Kosmopolitan yang rendah ditunjukkan dengan minimnya hubungan antar petani di luar daerah untuk mengikuti penyuluhan.

Fangohoi dkk, (2022) mengemukakan bahwa Kecenderungan petani dengan pengalaman pertanian yang panjang diasosiasikan dengan kosmopolitan yang rendah menyebabkan partisipasi yang tidak terlalu tinggi. Sedangkan petani dengan kosmopolitan tinggi adalah petani yang cenderung berkomunikasi untuk menerima informasi dan menambah pengetahuan dari penyuluh atau media yang berbeda. Tingkat kosmopolitan seseorang dapat dilihat berdasarkan frekuensi petani dalam mengadakan kontak dengan orang luar diluar jangkauan sistem lingkungannya seperti PPL, tokoh masyarakat dan dinas pemerintah maupun terhadap media informasi seperti internet, majalah, televisi dan radio. Pengaruh kosmopolitanisme terhadap tingkat partisipasi petani menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kosmopolitan seseorang maka semakin tinggi pula partisipasinya pada sebuah programnya (Syifa dkk, 2020).

Kosmopolitan mengacu pada seberapa sering seseorang bepergian ke luar wilayah rumahnya untuk melakukan aktivitas di luar tempat tinggalnya, dan seberapa sering seseorang berinteraksi dengan orang lain di luar tempat tinggalnya. Tingkat kosmopolitan yang rendah ditunjukkan oleh fakta bahwa ketika bepergian ke luar kawasan pemukiman, seseorang tidak sering pergi ke pusat konsultasi atau kegiatan pertanian lainnya dan bertemu dengan para inovator. Petani dengan tingkat kosmopolitan tinggi mendapatkan lebih banyak informasi dari hal-hal yang mereka lihat di lingkungannya atau dari berbagai sumber informasi, berinteraksi dengan pihak luar yang membawa inovasi baru.

3. Motivasi petani

Motivasi petani mempengaruhi partisipasi petani dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Menurut Mandaru dkk, (2021) motivasi petani

merupakan faktor paling dominan dalam mempengaruhi tingkat partisipasi petani. Motivasi petani bisa didasarkan atas kebutuhan dan harapan petani yang belum sempat terealisasikan sehingga mereka mau berpartisipasi dalam sebuah program untuk ikut membahas yang permasalahan yang mereka hadapi dilapangan. Partisipasi petani merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, seperti permasalahan yang dihadapi dalam usahatani, kendala, dan tujuan yang diharapkan petani. Petani diharapkan untuk berpartisipasi dalam mengkomunikasikan aspirasi yang ingin dicapai, sehingga program dan proyek pembangunan dapat gagal tanpa kehadiran petani, selanjutnya petani lebih mempercayai program pembangunan daripada merasa dilibatkan dalam persiapan dan perencanaan. karena mereka lebih mengetahui manfaat program pembangunan. Di luar program dan memiliki rasa memiliki terhadap program, diasumsikan bahwa merupakan hak demokrasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunannya sendiri (Keno dkk, 2015).

Riduwan (2015) mengatakan bahwa motivasi terdiri dari motif, harapan dan insentif. Motif adalah motivator keinginan dan penggerak keinginan untuk bekerja, harapan adalah kesempatan untuk mencapai tujuan yang dihasilkan dari perilaku, insentif mendorong memberi kepada mereka yang lebih berprestasi atau berpartisipasi.

Menurut Davis dan Newstorm (1990), motivasi adalah kekuatan pendorong. Motivasi terdiri dari valensi, harapan dan sumber daya. Valensi mengacu pada intensitas keinginan seseorang untuk mendapatkan hadiah, yaitu keinginan mereka untuk mencapai tujuan. Harapan adalah kekuatan dalam keyakinan bahwa upaya akan mengarah pada penyelesaian tugas. Instrumentalitas menunjukkan bahwa melakukan pekerjaan mengarah pada penyelesaian tugas. Ketika valensi, harapan, dan sumber daya tinggi, maka motivasi seseorang akan kuat.

4. Status dalam kelompok

Status dalam kelompok mempengaruhi partisipasi petani dalam penyusunan program penyuluhan desa, ketua dan pengurus kelompok tani memiliki peran yang penting dalam mendukung kelompok mencapai tujuan kelompoknya terlebih dalam menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang

dihadapi anggota kelompoknya dalam berusaha tani (Rangga dan Listiana, 2020). Dalam kelompok tani dipimpin oleh pengurus kelompok tani. Pengurus kelompok tani inilah yang memiliki banyak tanggungjawab dalam ikut berpartisipasi dalam penyusunan program penyuluhan pertanian yang sesuai dengan keadaan lingkungan usaha tani.

Secara umum dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin atau pengurus adalah orang yang bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, bertindak pertama, memimpin, mengarahkan pikiran, pendapat, tindakan orang lain, mengayomi dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Dalam banyak kasus, seorang pemimpin adalah faktor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Pimpinan harus mengarahkan pekerjaan dan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan dan lembaga, sehingga manajemen efektif (Robbins dan Judge, 2007), anggota harus dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk bekerja sama dengan kelompok dan pihak lain. Hal ini membutuhkan partisipasi anggota dan kemauan pengurus untuk bertemu dengan anggotanya untuk mengumpulkan informasi (Suadnya dkk, 2020).

Petani sangat berharap tujuan dari kelompok tanina dapat tercapai dengan cara yang berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Kehadiran aktivitas dan peran aktivitas setiap anggota dalam kegiatan kelompok meningkatkan partisipasi dan interaksi, hubungan individu, yang juga dapat diperkuat melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok dapat mempengaruhi perilaku anggota kelompok. Dinamika kelompok sangat mempengaruhi perilaku anggota, dimana anggota bertindak lebih ke arah tujuan bersama, bertindak pada setiap tahap partisipasi anggota (Asari dkk, 2010).

2.2 Hasil Pengkajian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat membantu penulis dalam mendapatkan referensi dan inspirasi serta dapat menjadi bahan perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada dengan pengkajian yang berjudul “Partisipasi Petani Dalam Penyusunan Program Desa

di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”. Adapun penelitian terdahulu disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengkajian Terdahulu

No	Nama dan Tahun pengkajian	Judul	Variabel	Hasil Pengkajian
1	Daryana, Juraemi, Ndan Imang (2019)	Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Tani Dalam Penyusunan Programa Penyuluhan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa	- Karakteristik Responden - Umur - Pendidikan - Tanggungan keluarga - Partisipasi pada RAT - Partisipasi pada pertemuan dan kegiatan - Partisipasi pada pembuatan programa	Tingkat partisipasi anggota kelompok tani dalam penyusunan programa penyuluhan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan tinggi.
2	Ronaldi Mandaru, Endayani Muhammad, Wely Y. Pello (2021)	F. V Desa (Leuntolu) Penyusunan Programa Penyuluhan Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu	- Motivasi petani - Ajakan penyuluh - Lingkungan - Umur - Jenis usaha tani - Tujuan usaha - Pengalaman - Kemitraan - kosmopolitan.	Motivasi merupakan faktor paling dominan dalam mempengaruhi tingkat partisipasi dengan peringkat utama diikuti oleh pengalaman, ajakan penyuluh, lingkungan, umur dan jenis usaha tani serta tujuan usaha dan kemitraan

3	Dzoelkarman, Idrus Salam, Awaluddin Hamzah (2019)	Partisipasi Tani Perencanaan Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian	Kontak Dalam Dan	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Kontak Tani dalam Memberi dan Menerima Informasi - Partisipasi Kontak Tani dalam Memberi Tanggapan dan Saran - Perencanaan program penyuluhan pertanian 	Tingkat partisipasi kontak tani dalam perencanaan program penyuluhan pertanian di Kecamatan Konda pada umumnya tergolong dalam kategori sedang.
---	---	---	------------------	---	---

Lanjutan tabel 1.

4	Mega Nabilla Ardiana, Ivanovich Agusta (2019)	Analisis Petani Asuransi Desa Curug Bitung.	Partisipasi dalam Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas komunikasi - Tingkat pendidikan - Tingkat pendapatan - Usia - Lama tinggal 	Faktor-faktor yang Mempengaruhi partisipasi yang digunakan pada penelitian ini tidak mampu menjelaskan mengenai tingkat partisipasi petani yang mayoritas berada pada tingkatan tidak ada partisipasi.
---	---	---	-----------------------------	---	--

5	Bili, Y., Olviana, T., Nainiti, S. P. . (2018).	Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Tani Dalam Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian, Di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang.	- Tingkat partisipasi anggota kelompok tani dalam perencanaan program penyuluhan pertanian - Partisipasi anggota kelompok tani dalam pengumpulan data - Partisipasi dalam penyusunan konsep program penyuluhan	Tingkat partisipasi anggota kelompok tani dalam perencanaan program peningkatan produksi padi ladang di Desa Oelbiteno sangat tinggi. Mereka juga sangat terlibat dalam pengumpulan data dan penyusunan ide program penyuluhan.
6	Salsabila Hanandita Syifa, Arip Wijiano, Hanifah Ihsaniyati (2021)	Partisipasi Petani Dalam Program Pengembangan Jagung Hibrida (Suatu Kasus Pada Kelompoktani Di Desa Mulyasari Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur)	- Partisipasi petani dalam tahap perencanaan - Partisipasi pada tahap pelaksanaan - Partisipasi pada tahap monitoring - Partisipasi petani dalam tahap evaluasi - Partisipasi tenaga - Pemikiran - Barang - Keterampilan	Jenis partisipasi yang diberikan petani dalam program pengembangan jagung hibrida yaitu berupa tenaga, pemikiran, barang, keterampilan dan uang. Jenis partisipasi yang paling sering

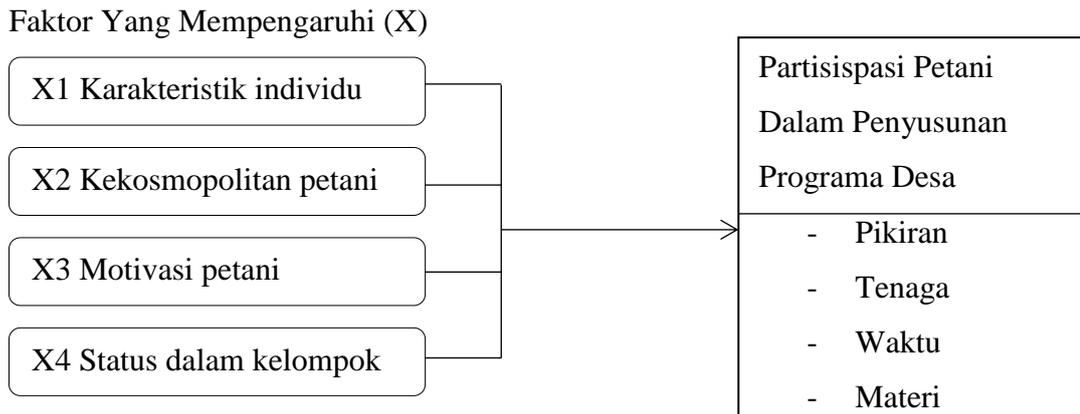
diberikan oleh petani yaitu dalam bentuk tenaga.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoretis variabel yang akan diteliti dan menunjukkan bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting, menurut studi bisnis (Ridwan dan Bangsawan, 2021). Partisipasi petani didefinisikan sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan. Mardikanto dan Soebianto (2013) mengutip Bornby (1974), yang menyatakan bahwa partisipasi berarti "partisipasi" untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat (Ardiana dan Agusta, 2019).

Program penyuluhan pertanian adalah rencana kerja penyuluh pertanian di desa penyuluhan untuk diterapkan pada masyarakat tani atau kelompok tani. Program ini harus sesuai dengan masalah dan kebutuhan petani, sehingga kelompok tani harus terlibat dalam pembuatan program. Kajian ini akan memberikan penjelasan dan analisis tentang bagaimana petani berpartisipasi dalam pembuatan program desa di Kecamatan Sunggal.

Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi petani dalam melakukan penyusunan program desa diantaranya, karakteristik individu, fasilitasi penyuluh, kekosmopolitan petani, motivasi petani, status dalam kelompok. Untuk memudahkan dalam pengarahannya pelaksanaan pengkajian maka dibawah ini dibuat kerangka pikir untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengkajian dengan judul "Partisipasi Petani Dalam Penyusunan Program Desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang".



Gambar 1. Kerangka Pikir Partisipasi Petani Dalam Penyusunan Programa Desa

Keterangan : —→ = Berpengaruh

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam pengkajian ini adalah:

1. Diduga tingkat Partisipasi petani dalam penyusunan programa desa di kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam kategori tinggi.
2. Diduga karakteristik individu, kosmopolitan, motivasi petani, dan status dalam kelompok mempengaruhi partisipasi petani dalam penyusunan programa desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.